

SKRIPSI

RIDA NUR KARIMA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP LABEL PANGAN YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP LABEL PANGAN YANG TIDAK BENAR
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 525

Penyusun,



Rida Nur Karima
NIM. 039714591

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 20 Juli 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

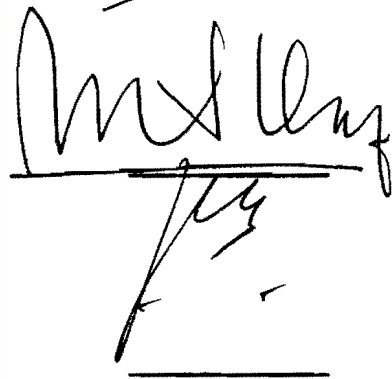
Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

2. Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

3. J. Sogar Sinamora, S.H., M.Hum.

4. Sri Handayani, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Label pangan merupakan salah satu informasi yang berkaitan dengan suatu produk pangan yang diberikan oleh pengusaha, disamping iklan, pamflet , brosur dan sebagainya. Adanya label pangan merupakan salah satu pemenuhan hak konsumen, seperti yang ditentukan dalam UUPK. Yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa yang digunakan. label pangan termasuk sebagai bentuk penawaran apabila memuat mengenai keterangan barang dan harga. Ketentuan mengenai label pangan ini telah diatur dengan sejumlah peraturan perundang - undangan. Antara lain yaitu UU no 8 tahun1999, UU no 7 tahun 1996, PP no 69 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut terdapat larangan adanya label pangan yang tidak benar dan menyesatkan. Selain itu dalam peraturan perundang -undangan juga mengatur mengenai ketentuan yang harus tercantum dalam suatu label pangan.
- b. Informasi yang benar, jelas, dan jujur khususnya mengenai produk pangan dapat secara efektif menghindarkan konsumen terhadap ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Mengingat pengaruhnya yang demikian penting tersebut, maka Dalam Undang -

undang No 8 tahun 1999 memberi hak bagi konsumen untuk mengugat produsen dan menyelesaikan permasalahannya baik itu di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan terdapat dua cara yaitu diselesaikan secara damai atau diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apabila konsumen memilih menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, jika para pihak terikat dalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam hal para pihak tidak pada suatu perjanjian maka konsumen dapat mendasarkan gugatan atas perbuatan melanggar hukum.

2. Saran

- a. Konsumen hendaknya menyadari pentingnya keberadaan informasi yang terdapat dalam label pangan. Oleh karena itu dengan adanya label yang diberikan oleh produsen, konsumen dapat memanfaatkannya untuk mengetahui tentang segala sesuatunya mengenai produk yang akan dibelinya. dan mengingat pentingnya pengaruh pangan bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita, maka konsumen harus selalu waspada dan teliti sebelum membeli produk pangan tertentu. Oleh karena itu konsumen seharusnya selalu mencermati informasi yang terdapat dalam label.
- b. Dalam menyelenggarakan usaha memberikan perlindungan bagi konsumen, hal yang paling penting dilakukan adalah memberikan

pembinaan dan pendidikan pada konsumen. Karena seperti kita ketahui di negara kita tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Oleh karena itu kepada masyarakat hendaknya diberikan pengertian mengenai adanya hak - hak yang dimiliki dalam kedudukannya sebagai konsumen. Sehingga apabila haknya dilanggar konsumen dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya tersebut sebagai akibat adanya pelanggaran atas haknya.

